

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya setiap saat dan dalam berbagai situasi. Apabila lebih dari satu individu memiliki kesamaan tujuan, maka terjadilah kerja sama, sebaliknya apabila lebih dari satu individu mempunyai kepentingan yang berbeda, maka muncullah masalah-masalah sosial seperti konflik yang terjadi di Ambon (Maluku), Ternate (Maluku Utara), Poso (Sulawesi Tengah), Kupang (Nusa Tenggara Timur)

Konflik merupakan suatu bentuk interaksi sosial ketika dua individu mempunyai kepentingan yang berbeda dan kehilangan keharmonisan di antara mereka. Pada dasarnya konflik adalah alami dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dikatakan Walter (199:1) *"the history of humankind and the rise and fall of civilizations is unquestionably a story of conflict. Conflict is inherent in human activities. It is omnipresent and foreordained."*

Penduduk asli kota Ambon tidak mencapai kemajuan yang berarti dalam kehidupan sosial ekonomi, tetapi para pendatang yang terdiri dari suku Buton, Bugis, Makasar, Jawa dan Sumatra Barat karena kegigihannya mendapatkan kemajuan yang pesat. Karena itu mereka berkembang sebagai pemilik uang yang dapat membeli tanah untuk perumahan dan sebagainya yang sebagian besar di daerah yang bertetangga dengan pemukiman Kristen bahkan di tengah-tengah pemukiman Kristen. Ini merupakan

kesalahan besar karena kurang memahami konflik yang terselubung antara Islam dan Kristen.

Pertumbuhan ini menimbulkan kebencian pihak Kristen yang merasa tanah peninggalan nenek moyang mereka telah diperkosa oleh pendatang, mereka merasa kehilangan warisan, diperparah lagi dengan berdirinya Masjid dipemukiman baru yang berdekatan dengan Gereja. Seperti kata Dr. Litaay “Awasi suku BBM, 4 orang saja sudah mendirikan Masjid”.

Ummat Islam asli Ambon atau Maluku sejak penjajahan Belanda telah memilih lapangan pekerjaan non Formal karena menolak kooperatif dengan Belanda. Mereka memilih pekerjaan sebagai pedagang, nelayan, pertukangan, petani bahkan kuli kasar. Masyarakat Suku Buton, Bugis Makasar dan Jawa sejak lebih seratus tahun yang lalu telah berdatangan ke Maluku khususnya pulau Ambon, Seram, Buru, pulau pulau Lease dan Maluku Utara. Selain karena kesamaan agama dengan Ummat Islam di daerah ini mereka juga punya kesamaan lapangan pekerjaan, karena itu suku-suku pendatang ini segera menyatu bahkan terjadi perkawinan antara para pedagang dan penduduk asli yang beragama Islam.

Sesudah RMS, terutama di atas 1960-an kedatangan pekerja-pekerja yang gigih ini terus bertambah sehingga dari segi jumlah telah terjadi lah pergeseran perimbangan yang berarti sehingga hampir sama dengan penduduk aslinya. Program transmigrasi telah membuat prosentasi jumlah yang beragama Islam terus bertambah, sedangkan mereka yang kurang berhasil di transmigrasi beralih ke kota Ambon dengan pekerjaan yang lebih sesuai karena itu para pendatang baru di Ambon termasuk mereka yang eks transmigrasi (Jawa dan Sunda) semakin banyak. Penolakan terhadap pendatang yang merupakan

pesaing pihak Kristen ini telah tampak sejak Dicky Wattimena menjadi Walikota Madya Ambon (1986-1991) saat barang dagangan para pedagang milik pendatang ini ditendang, ditumpahkan dagangannya dan dihardik agar keluar dari kota Ambon kembali dan ke daerah asalnya.

Dalam kerusuhan ini para pendatang dianggap sebagai penyebab rusaknya semangat Pela-Gandong karena mereka tidak mengamalkan tata krama Pela-Gandong. Penilaian ini terasa sangat dibuat-buat karena umat Islam penduduk asli Maluku sejak lama sadar bahwa Pela-Gandong tidak punya nilai apa-apa, apa lagi bagi kaum pendatang. Pela-Gandong sesungguhnya hanya ikatan kekerabatan antara 2 desa, jadi tidak mengikat seluruh masyarakat asli apa lagi hanya berlaku di Maluku bagian tengah saja, jadi dari segi kualitas ikatannya terlalu semu, persentasenya berkisar 5% saja sebagai jaring pengaman. Di kota madya Ambon yang jumlah pendatang cukup banyak maka prosentasi itu semakin kecil.

Demikian juga terdapat perbedaan yang tajam antara perilaku budaya umat Islam asli pulau Ambon yang dipengaruhi secara kuat oleh budaya Islam yang religius sementara pihak Kristen oleh budaya barat yang arogan dan ambtenar.

Berdasarkan konsep Parsons (1951), setiap sistem sosial diperlukan persyaratan fungsional. Diantara persyaratan-persyaratan itu di jelaskan bahwa setiap sosial harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dengan tuntutan transformasi pada setiap kondisi tindakan warga (adaptation) berikutnya, tindakan warga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama (goal attainment). Kemudian persyaratan lain adalah bahwa dalam interaksi antarwarga setidaknya harus ada suatu tingkat solidaritas, agar struktur dan sistem sosial berfungsi (integration) tanpaknya apa yang dikemukakan

Parson itu cukup relevan untuk dipakai sebagai salah satu dasar dalam menganalisis secara structural dan fungsional konflik lokal: dan atas dasar konsep Parsons ini pengetahuan mengenai konflik sosial akan lebih memadai. Sehubungan dengan itu Coser mengatakan bahwa konflik adalah suatu komponen penting dalam setiap interaksi sosial oleh karena itu menurut Coser (1974) bahwa konflik tidak perlu dihindari, sebab konflik tidak boleh dikatakan selalu tidak baik atau memecah belah atau merusak. Dengan kata lain konflik dapat menyumbang banyak bagi kelestarian hidup sosial, bahkan mempererat hubungan antaranggota.

Berbicara tentang fungsi ternyata tidak hanya sekedar berkaitan dengan hal peran, relasi fungsi tidak selalu terpadu (negatif) karena dapat saja relasi yang saling konflik lebih-lebih kalau di dalamnya ada cukup banyak fraksi. Dalam fungsi terdapat struktur, dalam fakta sosial terdapat struktur dan fungsi yang saling terkait erat (kalau tanpakaitan berarti bukan struktur). Teori fungsi tidak dirangcang dalam kaitannya dengan perubahan, sehingga antara keduanya agak sulit untuk dikaitkan. Sering teori ini hanya terbatas mengungkapkan hubungan-hubungan yang serasi atau seimbang (equilibrium) saja, dan kurang mampu melihat potensi-potensi konflik yang mungkin ada (Brown 1980). Pencampuran teori ini dengan teori perubahan, umumnya menyangkut perilaku, inipun memerlukan waktu yang panjang.

Dengan demikian, konflik sosial ambon dapat membeikan potensi perubahan terhadap cara pandang berpikir bagi masyarakat Maluku khususnya orang-orang pribumi yang sebelum konflik sosial perasaan gengsinya tinggi terhadap pekerjaan, jika pekerjaan itu menurutnya hina seperti; jadi tukang pikul bakul, tukang becak, berdagang di pasar. Namun setelah konflik sosial orang-orang pribumi yang tadinya tidak mau bekerja dan

merasa pekerjaan itu hina, akan bisa untuk menerima pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan sehari-hari.

Ambon sebelum terjadinya konflik sosial pada tahun 1999, penataan kota rapi, dengan lingkungan yang bersih, hingga mendapat julukan manis, yang artinya manis atau indah. Karena itu, Ambon pernah beberapa kali mendapatkan Adipura. Problema sosial kota-kota besar seperti tuna wisma, kaki lima, pengamen-pengemis, sampah dan tindakan kriminal jarang dijumpai. Sebagaimana kota-kota besar lainnya, penduduk kota Ambon terdiri atas beragam ras, bangsa, dan etnik. Orang Arab dan China bersama etnis Bugis, Buton, dan Makasar (dikenal dengan sebutan "BBM") memegang peran penting dalam perekonomian kota dan daerah. Sementara orang-orang Maluku yang juga terdiri atas beragam etnik cenderung terpinggirkan.

Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang didominasi pemeluk agama Islam, di Ambon sebanyak 49,2 % warganya memeluk agama Kristen Protestan, 44,3% memeluk agama Islam, 6,35 % Katholik, 0,07% Hindu, dan 0,04% Budha. Pemeluk Islam umumnya adalah pendatang, yaitu orang-orang Arab serta etnik "BBM". Meski ada juga orang-orang Ambon dan Maluku yang memeluk agama Islam. Selain berperan dalam perekonomian untuk dapat bertahan hidup di daerah ini, para pendatang khususnya etnik Bugis, Buton, dan Makasar (BBM) juga bersedia bekerja di sektor-sektor informal yang cenderung dihindari penduduk asli. Hingga muncul kesan, perekonomian Ambon dan Maluku dikuasai pendatang dan pemeluk agama Islam.

Sistem kekerabatan yang sangat kuat diantara orang-orang Ambon, baik pemeluk Islam maupun Kristen kian mempertegas struktur sosial, ekonomi, dan politik. Jika ada seorang kepala daerah baru dilantik, ada kecenderungan pejabat-pejabat di

bawahnya akan diganti oleh mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan si pejabat baru. Ikatan kekerabatan ini mudah sekali diamati, karena setiap orang “asli” selalu menggunakan nama fam atau “marga”.

Ambon di saat konflik sosial Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak awal 1999 terjadi konflik sosial di Ambon yang kemudian menyebar hampir ke seluruh pelosok Maluku. Konflik ini menempatkan orang Islam yang dalam bahasa setempat disebut Acang (dari kata Hasan) berhadapan dengan orang Kristen yang biasa dipanggil Obet (dari kata Robert). Dalam konflik ini, kelompok Acang menguasai permukiman di daerah pantai dan dataran rendah. Sementara kelompok Obet menguasai dataran tinggi dan perbukitan. Rumah, toko, dan segala bangunan milik kelompok Obet yang dikuasai kelompok Acang saat itu, sebagian besar habis dijarah dan dibakar. Demikian pula sebaliknya, bangunan dan harta kekayaan kelompok Acang yang ada di daerah kekuasaan Obet, sebagian besar habis dijarah dan dibakar. Akibatnya, dapat kita saksikan, antara lain ratusan bahkan ribuan rumah penduduk dan toko dibakar. Sarana dan prasarana dasar, seperti kantor pemerintah, sekolah, jaringan telkom, jaringan PAM, juga menjadi sasaran. Pendek kata, kota menjadi lumpuh.

Tidak ada angka pasti berapa banyak korban jiwa yang jatuh waktu itu. Penyiksaan, pembunuhan, dan aneka macam perilaku “tak beradab” menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari saat ini. Masing-masing kelompok, Acang dan Obet, mengungsi ke tempat yang dianggap aman. Acang mengungsi ke kawasan yang dikuasai Acang, dan Obet mengungsi ke kawasan yang dikuasai Obet. Masyarakat terpecah dan terkotak-kota berdasar kelompok serta keyakinan.

Upaya mengakhiri konflik ini ternyata tidak mudah karena ada beberapa pihak yang diduga diuntungkan dengan adanya konflik. Bantuan dana dari berbagai pihak terhadap masing-masing kelompok yang berseteru menjadi “berkah” bagi sebagian orang.

Ambon pasca konflik sosial Masyarakat kini tinggal terkotak-kotak, berdasarkan kelompok dan golongan. Kelompok Obet tinggal di wilayah-wilayah dataran tinggi atau daerah atas, sementara kelompok Acang di wilayah dataran rendah atau dekat pantai. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antar kelompok sudah berjalan “normal”. Tapi, untuk tinggal berbaur dengan kelompok yang berbeda, masih dirasakan kurang “nyaman”. Etnis tertentu, terutama Cina yang umumnya bekerja sebagai pedagang dengan modal besar, memilih strategi menunggu situasi kondusif. Tanah dan rumah mereka tidak dijual, tapi dititipkan pada orang lain, aparat, atau tokoh masyarakat untuk menjaganya. Para penjaga ini diuntungkan dari dua sisi. Yaitu, dari pemilik rumah, mereka mendapat uang jaga. Jika ada pendatang yang mau menempati rumah (bekas terbakar) tersebut, mereka pun mendapat uang sewa tambahan.

Sebenarnya masyarakat sudah jenuh oleh kondisi sosial yang ada dan keamanan yang labil. Akibatnya, banyak yang apatis serta menjalani kehidupan hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya sendiri. Bisa dikatakan hampir seluruh tatanan sosial hancur, warga terkotak-kotak, dan saling curiga. Kadang terjadi perkelahian antar-warga. Khususnya kalangan muda di satu kelurahan, terutama di daerah pengungsian. Minum-minuman keras hingga mabuk suatu kebiasaan di masa lalu masih banyak dilakukan hingga kini. Kondisi mabuk ini menjadi salah satu pemicu mudahnya muncul perkelahian-perkelahian tersebut.

Segera setelah konflik reda, sejumlah program/proyek kemanusiaan, baik dari pemerintah maupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), mencoba masuk dengan maksud segera memulihkan Ambon. Kota yang semula berduka akibat konflik ini tiba-tiba mendapat “berkah” bantuan. Namun, tidak sedikit program yang dikurcurkan tanpa perencanaan matang. Sehingga masyarakat cenderung memandang kehadiran suatu lembaga identik dengan kehadiran bantuan atau uang. Awalnya, *Pilot Project* juga disikapi seperti ini. Ketika Tim *Pilot Project* pertama kali masuk ke daerah ini, masing-masing stakeholder baik itu tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan sudah mendapat informasi tentang *Pilot Project*. Tapi, informasi yang didapat hanya terbatas dari buku Pedoman Umum *Pilot Project*.

Di sisi lain, konflik sosial ternyata tidak mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Umumnya masyarakat Ambon masih mengutamakan penampilan luar (lifestyle), antara lain dengan menggunakan barang-barang bermerek terkenal atau berkualitas tinggi, meski mahal untuk kondisi saat ini. Seperti, baju, sepatu, perhiasan, serta alat rumah tangga yang cukup mewah. Perilaku konsumtif tersebut menimbulkan dampak sosial. Karena, tidak sedikit warga yang jatuh miskin akibat kerusuhan, namun pola hidupnya masih seperti sebelum kerusuhan. Yang merasa senang dengan situasi ini adalah para pedagang, karena kerusuhan ternyata tidak banyak berpengaruh terhadap pola konsumsi. Banyak pedagang, baik sektor formal maupun informal (kakilima) yang menyampaikan, pasca kerusuhan ini mereka tetap dapat menikmati keuntungan yang tinggi, serta perputaran modal yang cepat.

Beberapa pihak khawatir dengan situasi yang dapat berdampak kepada peningkatan angka kejahatan. Data kriminalitas di tingkat kota cenderung

mengindikasikan peningkatan. Upaya membangun kebersamaan dan menumbuhkan kembali semangat membangun telah diupayakan pemda, termasuk pemerintah kelurahan, dengan mengembalikan salah satu budaya setempat yang dikenal dengan masohi, atau gotong royong untuk menggalang kebersamaan. Kegiatan masohi dilakukan melalui satu kegiatan bersama. Dalam kegiatan ini semua masyarakat didorong ikut terlibat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Misalnya, dalam pembangunan gereja kaum, Muslim turut menyumbang. Sebaliknya, apabila kaum Muslim membangun mesjid, kaum Nasrani turut menyumbang. Kebiasaan lainnya yang mulai ditumbuhkan kembali adalah makan bersama (makan pattita) sebagai simbol kebersamaan dan persaudaraan. Semua kegiatan ini biasanya diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat umum.

Para siswa SMA sebagai generasi muda, diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagai mana dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter generasi muda serta peradaban bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab.

Hal tersebut tidak terlepas dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang diimplementasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan yang mempunyai tanggung jawab untuk membentuk warga negara yang baik. Namun, demikian masih ditemukan berbagai kendala. Kendala dan keterbatasan tersebut menurut Winataputra dan

Budimansyah (118-119: 2007) adalah (1). Masukan instrumental (*instrumental input*) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru atau dosen serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan (*environmental input*) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis. Dengan demikian, pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan tidak mengarah pada misi sebagaimana seharusnya. Beberapa indikasi empirik yang menunjukkan salah arah tersebut antara lain; *Pertama*, proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (*instructional effects*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (*afektif dan psikomotorik*) dan memperoleh dampak pengiring (*nurturant affects*) sebagai "hidden kurikulum" belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya. *Kedua*, pengolahan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa atau mahasiswa melalui melibatkan secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (intra dan ekstrakurikuler) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa atau mahasiswa. *Ketiga*, pelaksanaan kegiatan ekstar- kurikuler sebagai wahana "*hands-on experience*" juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan anatara penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam kehidupan yang demokratis dan sadar hukum.

PKn sebagai sebuah sistem pendidikan atau lembaga yang semestinya menciptakan iklim yang kondusif untuk mendukung proses belajar dan mendidik warga

negara muda (siswa), proses belajar kondusif dan demokratis. Lingkungan yang damai dan menyenangkan adalah sangat kondusif untuk memfalsifikasi agar terjadinya proses belajar yang lebih baik. Sebaliknya konflik dan kekerasan dalam kehidupan di sekolah maupun masyarakat memberikan dampak negatif terhadap proses belajar siswa.

PKn sangat diperlukan dan memiliki nilai serta kedudukan yang sangat strategis bagi *'national character building'* dalam arti seluas-luasnya terutama dalam membentuk warga negara yang baik. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, PKn sangat rentan terhadap *bias politik praktis penguasa* (the ruling class) sehingga ia cenderung lebih merupakan instrumen penguasa dari pada sebagai wahana pembangunan watak anak bangsa berdasarkan konstitusi seperti yang dibuktikan oleh sejumlah hasil penelitian para ahli Civic Education (Apple, 1979, 1982; Bourdieu and Passeron, 1977; Snyders, 1976; Whitty, 1985) yang mengemukakan:

It (citizenship education) has also often reflected the interests of those in power in a particular society and thus has been a matter of indoctrination and the establishment of ideological hegemony rather than of education “ (Cogan, 1998: 5)

PKn membentuk karakter warga negara mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, akan lebih dari itu PKn sebagai pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal yang baik sehingga peserta didik faham (domain kognitif) tentang mana yang baik dan mana yang buruk, mampu merasakan (domain afektif) nilai yang baik dan mau melakukannya (domain psikomotor). Seperti kata Aristoteles, karakter itu erat kaitannya dengan ”habit” atau kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan dan dilakukan.

PKn diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang membentuknya berdasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongannya sesuai motto Bhineka Tunggal Ika.

PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang cerdas, trampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. PKn semestinya mendidik siswa atau generasi muda untuk berkarakter baik dan mampu memecahkan masalah secara demokrasi, termasuk memecahkan masalah konflik mereka sendiri. Dengan demikian, pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peran penting dalam menyediakan pengajaran resolusi konflik.

PKn diharapkan mampu membelajarkan siswa untuk memecahkan masalah-masalah sosial bukan konvensional yang hanya menuntut siswa untuk menghafal fakta-fakta, yang hanya menggunakan metode ceramah yang membosankan siswa, ataupun pendidikan yang hanya sekedar mewariskan nilai-nilai lama tanpa dikaji secara kritis, dan juga bukan pendidikan yang hanya menekankan penguasaan disiplin ilmu dan pengembangan intelektualisme. Dengan meminjam tipologi tradisi social studies dari Barr, Barth, dan Shermis (1978), Pendidikan Kewarganegaraan mampu membelajarkan

siswa untuk mampu memecahkan masalah-masalah sosial, termasuk konflik-konflik sosial yang bertumbuh pada tradisi *social studies* sebagai *reflective inquiry* (yang dikembangkan oleh Hunt and Metcalf, 1955).

PKn sebagai wahana pencerdasan bangsa sebagaimana menjadi tujuan nasional didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dibiarkan terus menjadi alat kekuasaan saja, akan tetapi menjadi pilar nasib bangsa dan generasi muda penerus bangsa. Apabila kita simak bersama, bahwa dalam pendidikan atau mendidik tidak hanya mentransferkan ilmu semata, namun lebih jauh tentang pengertian dan pengetahuan itu yang lebih utama sehinggadapat mengubah atau membentuk karakter dan watak generasi muda seseorang agar lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika maupun estetika maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

PKn adalah suatu hal yang benar-benar ditanamkan selain menanamkan fisik, mental, dan moral bagi generasi muda agar mereka menjadi manusia yang beriman dan taqwa serta menghargai nilai-nilai luhur budaya masyarakat setempat seperti yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan .

Hasil analisis terhadap perkembangan PKn di Indonesia (Winataputra, 2001) menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang begitu mendasar pada tahapan paradigma sehingga telah mengakibatkan ketidakpastian, baik dalam tataran konseptual maupun tataran praktisi. Kelemahan-kelemahan tersebut, setidaknya, terdiri atas empat kelemahan pokok, yakni: (1) Kelemahan dalam konseptualisasi PKn (2) Penekanan yang sangat berlebihan pada proses pendidikan moral behavioristik,

terperangkap pada proses penanaman nilai yang cenderung indoktrinatif (*values inculcation*): (3) ketidakkonsisten terhadap penjabaran berbagai dimensi tujuan PKn ke dalam kurikulum; dan (4) Keterisolasian proses pembelajaran dari konteks disiplin keilmuan dan lingkungan sosial budaya.

Sejalan dengan penilaian tersebut Wahab (1999) mengemukakan beberapa kelemahan yang ada pada PKn yang di masa yang lalu, (1) Terlalu menekankan pada aspek nilai moral yang menempatkan siswa sebagai objek yang berkewajiban untuk menerima nilai-nilai moral tertentu; (2) Kurang diarahkan pada pemahan struktur, proses, dan institusi-institusi negara dengan segala kelengkapannya; (3) Pada umumnya bersifat dogmatis dan relatif ; dan (4) Berorientasi pada kepentingan penguasa.

PKn masih jauh dari harapan, belum berhasil meningkatkan kecerdasan dan keterampilan anak didik, melainkan gagal dalam membentuk karakter dan watak kepribadian (*nation and character building*). Konsekuensi yang diterima konflik sosial terjadi dimana-mana, keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pun disuarakan oleh beberapa daerah seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS), dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tomagola Tamrin (Ratnawati: 54-55 2006) bahwa di Maluku setiap komunitas (yang beragama Islam maupun Keresten), sebelum konflik, dapat dijadikan sebagai salah satu 'modal' suatu masyarakat yang memiliki toleransi beragama yang tinggi di Indonesia. Mereka memiliki faktor 'permersatu' yang cukup kuat, yaitu kultur (budaya) termasuk di dalamnya adalah apa yang disebut Luhulima sebagai "Agama Ambon". Ketika terjadi konflik, kedua kelompok

masyarakat agama yang berbeda tersebut dapat diselesaikan lewat mekanisme tradisional yang dikenal dengan sistem pela gandong di Ambon atau Maluku.

Konflik Ambon terjadi tidak lama setelah kerusuhan Katapang dan Kupang, dengan kemungkinan besar merupakan 'rangkaiannya' dari bererapa peristiwa kekerasan lainnya (misalnya di Situbondo, Bayuwangi, Pontianak, dan lain-lain). Hal ini merupakan indikasi kuat dari 'tangan-tangan jahat' yang disinyalir Presiden Abdurrahman Wahid pada "Malam Basudara warga Maluku "se Jabotabek" pada 15 Januari 2000. Dan sangat besar kemungkinannya, para aktor intelektual dan pelaku atau pendukung kerusuhan tersebut adalah mereka dari kelompok 'status quo' yang sedang melakukan fower struggle melawan kelompok pro reformasi. Para petualangan kekuasaan (anti reformasi) di Jakarta sengaja men-switch, men-design, atau membelokkan konflik vertical (Negara vis-à-vis masyarakat yang di Ambon antara lain yang ditandai dengan demonstrasi anti Dwi Fungsi TNI oleh kaum muda. Dalam hal ini Mahasiswa Universitas Pattimura sekitar bulan November 1998), menjadi konflik horizontal antara warga dengan menggunakan isu agama. Seperti diketahui, agama adalah salah satu titik rawan integrasi bangsa. Bersama-sama dengan isu suku, ras, dan antara golongan agama termasuk dalam kategori masalah SARA. (Ratnawati: 57-2006)

Pentingnya sebuah bangsa memiliki nasionalisme positif di gambarkan pula oleh Bung Karno dengan mengutip pendapat pemimpin Mesir yang termashyur, Mustafa Kamil, sbb:

“Oleh karena rasa kebangsaanlah, maka bangsa-bangsa Jang terbelakang lekas mencapai peradaban, kebesaran dan kekuasaan. Rasa kebangsaan jang menjadi darah jang mengalir dalam urat-urat bangsa-bangsa jang kuat dan rasa

kebangsaanlah yang memberi hidup kepada tiap-tiap manusia yang hidup”,
(Soekarno, 1930: 118)

Sebagai negara yang tengah menjalani peralihan dari negara otoriter militeristik ke negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sangat rawan dengan konflik. Konflik yang paling kentara adalah konflik horizontal, konflik antara masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Selama kurung waktu dari 1998 hingga sekarang, konflik horizontal menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan tentu saja peran pemuda juga ikut dalam penentu perubahan dan menuntut dicari solusinya. Seperti konflik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah, Ambon Maluku, di Kalimantan Barat dan Tengah, serta pergolakan daerah untuk menuntut pemerintahan sendiri seperti yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Oragaisasi Papua Merdeka (OPM),. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka PKn masukan dapat menjadi resolusi konflik, termasuk bagaimana, pembinaan generasi muda pasca konflik. Dengan demikian PKn sebagai pendidikan politik dan moral dapat berperan meredam konflik-konflik sosial.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang penelitian diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa situasi pasca konflik sosial berpengaruh terhadap pembinaan karakter generasi muda?
2. Kendala apa yang ditemui dalam proses pembentukan karakter generasi muda pasca konflik sosial melalui PKn?

3. Solusi-solusi apa yang digunakan dalam kaitan dengan permasalahan pembinaan karakter generasi muda pasca konflik sosial yang dilakukan masyarakat, organisasi, sosial politik, organisasi kepemudaan dan keluarga ?
4. Bagaimana koordinasi antara guru dalam membentuk karakter generasi muda melalui pembelajaran PKN dengan peran masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi kepemudaan dan keluarga ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana implementasi pembinaan karakter generasi muda pasca konflik sosial dan solusinya melalui pendekatan yang diintegrasikan ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui pengaruh situasi pasca konflik sosial terhadap pembinaan karakter generasi muda.
2. Mengetahui kendala yang ditemui dalam proses pembentukan karakter generasi muda pasca konflik sosial.
3. Mengetahui solusi-solusi apa yang digunakan dalam kaitan dengan permasalahan pembinaan karakter generasi muda pasca konflik sosial yang dilakukan masyarakat, organisasi, sosial politik, organisasi kepemudaan, dan keluarga.

4. Mengetahui bagaimana koordinasi antara guru dalam membentuk karakter generasi muda melalui pembelajaran PKn di sekolah dengan peran masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi kepemudaan dan keluarga.

2. Manfaat Penelitian

Secara teoretik, penelitian ini akan menggali, mengkaji dan mengorganisasikan PKn dalam membangun karakter generasi muda secara konseptual-filosofis yang akan menghasilkan landasan PKn dan kerangka dasar secara konseptual-teoritis tentang pengembangan karakter generasi muda bangsa sebagai bahan masukan bagi pengembangan PKn pembangunan karakter generasi muda bangsa. Temuan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Para akademisi atau komunitas akademik, khususnya dalam bidang PKn untuk bahan masukan ke arah pembangunan PKn sebagai pendidikan disiplin ilmu.
2. Para praktisi untuk pengembangan tenaga kependidikan dan keguruan di lembaga pendidikan tinggi yang bertugas menghasilkan lulusan tenaga guru PKn.
3. Para pengembang kurikulum PKn baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi maupun lingkup masyarakat dan birokrasi.
4. Para praktisi PKn baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi maupun lingkungan masyarakat dan birokrasi.
5. Para pengambil kebijakan terutama yang terkait dengan program PKn dalam upaya mempersiapkan warga negara yang cerdas baik secara intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual, dan tanggung jawab, serta mampu

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara berkeadaban.

D. Asumsi Penelitian

Konflik bersifat alamiah, bagian dari kehidupan. Bila konflik dapat difahami, ia dapat menjadi suatu kesempatan untuk belajar dan berkreasi tantangan bagi orang-orang yang dalam konflik adalah menerapkan prinsip-prinsip kerja sama yang kreatif dalam hubungan antar manusia (Bodine, Crawford, and Schrumf, 1994).

Konflik sosial adalah aspek yang meresap dalam kehidupan, yang memberikan fungsi-fungsi personal dan sosial. Konflik dapat bersifat disfungsional, dan karena secara luas tersedia sebagai senjata yang sangat berbahaya, maka konflik dapat membawa ke arah kekerasan (*violence*) dan kematian. Namun demikian, konflik juga dapat bersifat produktif. Konflik merupakan media, dimana masalah-masalah dapat diungkapkan dan pemecahannya dapat dikembangkan. Konflik merupakan akar bagi perubahan personal dan sosial (Detusch and Raider, 2002).

E. Pertanyaan Penelitian

Dari fokus masalah penelitian yang diuraikan di atas, dapat diambil beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa situasi pasca konflik sosial berpengaruh terhadap pembinaan karakter generasi muda melalui PKn di sekolah ?
2. Kendala apa saja yang ditemui dalam proses pembentukan karakter generasi muda pasca konflik sosial melalui PKn di sekolah ?

3. Solusi-solusi apa yang digunakan dalam kaitan dengan permasalahan pembinaan karakter generasi muda pasca konflik sosial yang dilakukan masyarakat, organisasi, sosial politik, organisasi kepemudaan, keluarga dalam membentuk karakter generasi muda?
4. Bagaimana koordinasi antara guru dalam membentuk karakter generasi muda melalui pembelajaran PKn di Sekolah dengan peran masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi kepemudaan dan keluarga ?

F. Penjelasan Konsep

1. Peran

Menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi dibawakan oleh seseorang, atau lembaga organisasi ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.

2. Karakter

Dalam pengertian harafiah, karakter mempunyai makna psikologis atau sifat kejiwaan terkait dengan aspek kepribadian (*personality*), akhlak atau budi pekerti, tabiat, watak, sifat kualitas yang membedakan seseorang dari yang lain atau kekhasan (*partikular quality*) yang dapat menjadikan seseorang terpercaya dari yang lain. Dari konteks inipun, karakter mengandung unsur moral, sikap bahkan perilaku untuk menentukan apakah seseorang memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik, terungkap pada saat seseorang itu melakukan perbuatan atau perilaku tertentu.

Membangun karakter (*character building*) adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan dengan orang lain. Ibarat sebuah huruf dalam alfabet yang tak pernah sama

antara yang satu dengan yang lain, demikianlah orang-orang yang berkarakter dapat dibedakan satu dengan lainnya termasuk dengan yang tidak atau belum berkarakter atau berkarakter tercela. (<http://koleksi-skripsi.blogspot.com/2008/07/teori-pembentukan-karakter.html>.)

3. Pembelajaran PKn.

Untuk mencapai tujuan PKn dengan paradigma baru perlu disusun materi dan model pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan dan harapan PKn yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*) dalam dimensi spiritual, rasional, emosional dan sosial, mengembangkan tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), serta mengembangkan anak didik berpartisipasi sebagai warga negara (*civic participation*) guna menopang tumbuh dan berkembangnya warga negara yang baik.

Pembelajaran PKn selayaknya dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian guru atau calon guru dalam mempersiapkan pembelajaran PKn di kelas, yakni bekal pengetahuan materi pembelajaran dan metode atau pendekatan pembelajaran.

Materi PKn dengan paradigma baru dikembangkan dalam bentuk standar nasional PKn yang pelaksanaannya berprinsip pada implementasi kurikulum terdesentralisasi. Ada empat isi pokok pendidikan kewarganegaraan, yakni:

- (1) Kemampuan dasar dan kemampuan kewarganegaraan sebagai sasaran pembentukan;
- (2) Standar materi kewarganegaraan sebagai muatan kurikulum dan pembelajaran;
- (3) Indikator pencapaian sebagai kriteria keberhasilan pencapaian kemampuan; dan
- (4) Rambu-rambu umum pembelajaran sebagai rujukan alternatif bagi para guru.

Pendidikan Kewarganegaraan” di Indonesia merupakan terjemahan dari kepustakaan asing *'civic education'* atau *'citizenship education'* atau *'education for citizenship'*. Meskipun demikian, dua istilah tersebut pernah dibedakan ketika diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam kurikulum Pendidikan Kewargaanegaraan tahun 1968. Istilah *'civic education'* biasanya diterjemahkan menjadi 'Pendidikan Kewargaan Negara', disingkat PKN, sedangkan *'citizenship education'* biasanya diterjemahkan menjadi 'Pendidikan Kewarganegaraan', disingkat PKn. Selain perbedaan istilah, secara konseptual dua istilah tersebut memiliki perbedaan ruang lingkup kajian seperti dapat dilihat dari pendapat Cogan dalam Sapriya, H. (2007: 26) yang menyatakan bahwa *'civic education'*, umumnya merujuk pada jenis mata pelajaran yang diselenggarakan dalam struktur sekolah formal. Mata pelajaran tersebut memfokuskan pada struktur, proses dan simbol-simbol pemerintahan, seperti lembaga-lembaga pemerintahan, proses penyelenggaraan pemerintahan, simbol-simbol negara, peran dan tanggung jawab warga negara. Sedangkan, PKn adalah istilah yang lebih inklusif dan merupakan pengalaman belajar di sekolah juga diluar sekolah baik non formal maupun informal yang terjadi di lingkungan keluarga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media dan sebagainya yang membantu untuk membentuk totalitas warga negara.

Dalam penelitian ini, pengertian kewarganegaraan lebih difokuskan pada pengertian pertama, yakni Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam istilah '*civic education*'. Meskipun demikian, istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini tetap menggunakan istilah 'Pendidikan Kewarganegaraan' mengingat istilah ini lebih memasyarakat dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi II, 1995), dua istilah tersebut tidak memiliki perbedaan makna yang berarti.

4. Konflik Sosial

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (biasanya juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya tidak berdaya

Tidak satu masyarakatpun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pu yang tidak pernah mengalami konflik antara anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi, sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Konflik adalah perlawanan mental sebagai akibat dari kebutuhan, dorongan atau tuntutan yang berlawanan tindakan perlawanan, karena ketidakcocokan atau ketidakserasian mengakibatkan berkelahi, berperang atau baku hantam. Menurut Webster dalam Dean G. Pruitt (1986), istilah "*conflict*" di dalam bahasa aslinya berarti Suatu "perkelahian, peperangan, atau perjuangan", yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Dengan kata lain, istilah tersebut menyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri. Secara singkat, istilah "*conflict*" menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal.

Menurut Webster dalam Dean G, Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. (2004 : 9-10) konflik sosial berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

G. Lokasi dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di SMA Negeri 9 Kota Ambon Provinsi Maluku. Letaknya di gunung Nania atas desa Waiheru jarak dari pusat kota 14 km. Pada awalnya Sekolah ini berdiri bernama SMA Negeri 9 Unggulan. Namun, disaat konflik sosial yang terjadi di Ambon beberapa waktu yang lalu, sekolah ini tidak lagi difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Siswa yang masuk ke

Sekolah tersebut benar-benar diseleksi melalui sekolah masing-masing. Setelah konflik reda tahun 2003 sekolah ini dapat difungsikan kembali tetap dengan status SMA Negeri 9 Ambon. Atas inisiatif guru-guru dan orang tua siswa, Akan tetapi tidak lagi berlabel SMA Unggulan yang menjadi pertimbangannya adalah mengingat anak-anak usia sekolah menengah atas tidak dapat mengancam pendidikan sering tersendat-tersekat karena sekolah tersebut tidak difungsikan .

